

# SKRIPSI

## PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE, DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

REZKI RAHMADANI OCTARINA S



DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

# SKRIPSI

## PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE, DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**REZKI RAHMADANI OCTARINA S**  
**A031201078**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2024**



# SKRIPSI

## PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE, DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

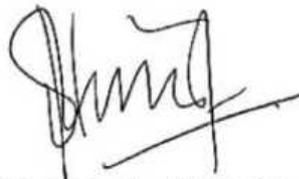
disusun dan diajukan oleh

**REZKI RAHMADANI OCTARINA S**  
**A031201078**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 23 April 2024

Pembimbing Utama



Dr. Rahmawati H.S, S.E., Ak., M.Si, CA., Asean ACPA  
NIP. 19761105 200701 2 001

Pembimbing Pendamping



Ade Ikhlas Amal Alam, S.E., M.S.A.  
NIP. 19910707 202005 3 001

Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Raoyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA  
NIP. 19650307 199403 1 003



# SKRIPSI

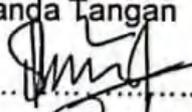
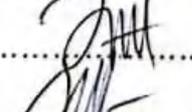
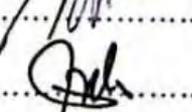
## PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE, DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

disusun dan diajukan oleh

**REZKI RAHMADANI OCTARINA S**  
**A031201078**

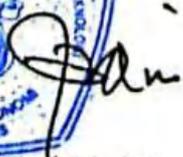
telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal 16 Mei 2024 dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Panitia Penilai

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Rahmawati HS, S.E., Ak., M.Si, CA., AseanCPA	Ketua	1..... 
2	Ade Ikhlas Amal Alam, S.E., M.S.A	Sekretaris	2..... 
3	Prof. Dr. H. Gagaring Pagalung, S.E., Ak., MS, CA	Anggota	3..... 
4	Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA	Anggota	4..... 

Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



  
Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA  
NIP 19650307 199403 1 003



## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Rezki Rahmadani Octarina S

NIM : A031201078

Jurusan : Akuntansi/Strata 1 (S1)

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE, DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA**

adalah hasil karya sendiri dan sepanjang pengetahuan buat sendiri, dan sejauh yang saya ketahui, tidak ada karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk mendapatkan gelar akademik di universitas, dan tidak ada pendapat atau karya ilmiah yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain selain yang dikutip secara tertulis dan disebutkan dalam daftar pustaka dan kutipan.

Apabila dikemudian hari ternyata ada unsur-unsur jiplakan dalam askah skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi atas tindakan saya dan akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan 70).

Makassar, 23 April 2024

Yang membuat pernyataan



Rezki Rahmadani Octarina S



## PRAKATA

*Alhamdulillah* rabbil'alamin, puji dan syukur tiada hentinya peneliti panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala karena atas segala pertolongan, rahmat, hidayah, dan kasih sayang-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia". Skripsi ini merupakan hasil kerja keras peneliti dalam memenuhi salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Stara 1 (S1) Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Meskipun demikian, peneliti memiliki harapan yang besar agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca. Perjalanan panjang telah peneliti lalui dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya. Namun berkat bantuan berbagai pihak yang memberikan bimbingan, masukan, dan krikitik membangun sehingga peneliti berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah peneliti dengan hormat mengucapkan terima kasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada :

1. Bapak Sainuddin dan Ibu Juhriah selaku orang tua peneliti yang senantiasa memberikan doa, semangat, dana, kepercayaan, restu, serta kasih sayang yang luar biasa selama peneliti menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi orang tua yang hebat dan luar biasa bagi peneliti. Semoga Allah memberikan kesehatan, kebahagiaan, serta umur yang panjang, Aamiin. Terima kasih Bapak Mama.



2. Muhammad Rifqy dan Rayyan Tri Putra S selaku adik kandung peneliti yang selalu memberikan energi positif dan membuat peneliti tersenyum sehingga peneliti selalu bersemangat dalam melakukan berbagai kegiatan.
3. Ibu Dr. Rahmawati H.S, S.E., Ak., M.Si, CA., Asean CPA selaku pembimbing I dan Bapak Ade Ikhlas Amal Alam, S.E., M.S.A. selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan, nasihat, waktu, tenaga, serta masukan yang berharga sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas segala ilmu yang telah diberikan kepada peneliti selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
5. Seluruh staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada peneliti selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Amay, Rani, dan Rey selaku teman rasa saudara peneliti yang senantiasa membersamai peneliti dari awal perkuliahan hingga sekarang. Terima kasih karena telah memberikan bantuan, nasihat, semangat, dan kenangan yang indah di dunia perkuliahan.
7. Ifadah, Khansa, Thaya, Farah, dan Febri selaku teman sedari SMA peneliti yang senantiasa memberikan semangat serta nasihat yang membangun bagi peneliti.
8. UKM Radio Kampus EBS FM Unhas yang telah memberikan pelajaran dan pengalaman berharga yang tidak akan peneliti lupakan. Terima kasih telah menjadi rumah bagi peneliti dalam mengembangkan diri, dan mendapatkan teman-teman baru dari berbagai jurusan yang ada di niversitas Hasanuddin.



9. Teman-teman FADER yang telah menjadi teman, saudara, serta rekan kerja yang baik selama peneliti menjadi pengurus di UKM Radio Kampus EBS FM Unhas.
10. Kak sei dan masyita selaku teman KKNT 109 Pencegahan Stunting di Kota Cinta Habibie Ainun yang telah kebersamai peneliti hingga sekarang dan memberikan pengalaman yang tidak terlupakan selama 41 hari di lokasi KKN.
11. Teman-teman In20nation, Akuntansi 2020 Universitas Hasanuddin yang telah kebersamai peneliti selama di perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
12. Rina atau diri peneliti sendiri yang telah bertahan dan berjuang dengan baik sejauh ini. Terima kasih telah mengalahkan rasa takut dan malas. Terima kasih telah memberikan yang terbaik dari Sekolah Dasar sampai Kuliah. Kamu hebat, kamu keren, kamu luar biasa.
13. Semua pihak yang namanya tidak dapat peneliti sebut satu persatu, yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta doa kepada peneliti.

Akhir kata, skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik serta saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri peneliti. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Makassar, 5 Mei 2024

Peneliti



Rezki Rahmadani Octarina S



## ABSTRAK

### PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE, DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

#### *THE INFLUENCE OF FIRM SIZE, LEVERAGE, AND INSTITUTIONAL OWNERSHIP ON TAX AVOIDANCE IN MANUFACTURING COMPANIES LISTED IN BURSA EFEK INDOENSIA*

Rezki Rahmadani Octarina S  
Rahmawati  
Ade Ikhlas Amal Alam

Penelitian ini mengkaji bagaimana kepemilikan institusional, leverage, dan ukuran perusahaan mempengaruhi penghindaran pajak. Penelitian ini berfokus pada semua perusahaan manufaktur barang konsumen yang tercatat di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2019 dan 2022. Dari populasi ini, hanya 51 perusahaan yang memenuhi semua kriteria, menyediakan 104 data untuk sampel penelitian. Data sekunder untuk sampel purposive diperoleh dari laporan tahunan perusahaan, yang dapat diakses melalui situs web resmi perusahaan dan Bursa Efek Indonesia. Sebuah model regresi multivariat digunakan untuk menilai dampak masing-masing variabel terhadap penghindaran pajak dalam analisis ini.

**Kata kunci:** Penghindaran Pajak, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Kepemilikan Institusional

*This study examines how institutional ownership, leverage, and company size affect tax avoidance. The research focuses on all consumer goods manufacturing companies listed on the Indonesian Stock Exchange between 2019 and 2022. Out of this population, only 51 businesses met all the criteria, providing 104 data points for the research sample. Secondary data for purposive sampling were obtained from the companies' annual reports, accessible through the official websites of the companies and the Indonesian Stock Exchange. A multivariate regression model is used to assess the impact of each variable on tax avoidance in this analysis.*

**Keywords:** Tax Avoidance, Firm Size, Leverage, Institutional Ownership



## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Kegunaan Penelitian .....	8
1.4.1. Kegunaan Teoritis.....	8
1.4.2. Kegunaan Praktis.....	8
1.5. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1. Landasan Teori .....	10
2.1.1. Teori Akuntansi Positif .....	10
2.1.2. Teori Agensi.....	11
2.2. Pajak.....	12
2.2.1. Pengertian Pajak.....	12
2.2.2. Dasar Hukum Pajak .....	13
2.2.3. Fungsi Pajak .....	14
2.2.4. Subjek Pajak.....	14
2.2.5. Objek Pajak .....	15
2.3. Pembangunan Nasional .....	15
2.4. Penghindaran Pajak .....	16
Ukuran Perusahaan .....	16
Leverage .....	17
Kepemilikan Institusional.....	18



2.8.	Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	18
2.9.	Kerangka Pemikiran .....	21
2.10.	Hipotesis Penelitian.....	24
2.10.1.	Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak	24
2.10.2.	Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak .....	25
2.10.3.	Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak .....	26
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>		<b>28</b>
3.1.	Rencana Penelitian .....	28
3.2.	Populasi dan Sampel .....	28
3.3.	Jenis dan Sumber Data.....	29
3.4.	Teknik Pengumpulan Data .....	29
3.5.	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	29
3.5.1.	Variabel Penelitian .....	29
3.5.2.	Definisi Operasional.....	30
3.6.	Metode Analisis Data .....	32
3.6.1.	Statistik Deskriptif .....	32
3.7.	Pengujian Asumsi Klasik .....	32
3.7.1.	Uji Normalitas Data .....	32
3.7.2.	Uji Multikolinearitas .....	32
3.7.3.	Uji Heteroskedasitas .....	33
3.8.	Analisis Regresi Linear Berganda .....	33
3.9.	Uji Hipotesis .....	34
3.9.1.	Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	34
3.9.2.	Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) .....	34
3.9.3.	Uji Signifikansi Prameter Individual (Uji Statistik t) .....	35
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>36</b>
4.1.	Deskriptif Data.....	36
4.1.1.	Deskripsi Objek Penelitian .....	36
4.1.2.	Deskripsi Sampel Penelitian.....	37
4.2.	Analisis Data Penelitian.....	38
4.2.1.	Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	38
4.2.2.	Hasil Uji Asumsi Klasik .....	41
4.3.1.	Hasil Uji Normalitas.....	41
4.3.2.	Uji Multikolinearitas .....	42



4.3.3. Uji Heteroskedastisitas.....	43
4.4. Analisis Regresi Linear Berganda .....	43
4.5. Hasil Uji Hipotesis .....	45
4.5.1. Uji Koefisien Determinasi (Uji R <sup>2</sup> ).....	45
4.4.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F).....	46
4.5.2. Uji Statistik Parameter Individual (Uji Statistik t) .....	46
4.6. Pembahasan .....	47
4.6.1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak ..	47
4.5.2. Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak .....	48
4.5.3. Pengaruh Kepemilikan Institusioanl terhadap Penghindaran Pajak .....	49
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>51</b>
5.1. Kesimpulan .....	51
5.2. Keterbatasan.....	51
5.3. Saran .....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>53</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>56</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2019-2022.....	2
Tabel 2. 1 Tabel Penelitian Terdahulu .....	18
Tabel 4. 1 Kriteria Pemilihan Sampel.....	36
Tabel 4. 2 Perusahaan Sampel.....	37
Tabel 4. 3 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	38
Tabel 4. 4 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov .....	41
Tabel 4. 5 Hasil Uji Multikolinearitas .....	42
Tabel 4. 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	43
Tabel 4. 7 Hasil Analisis Regresi .....	43
Tabel 4. 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (Uji R <sup>2</sup> ) .....	45
Tabel 4. 9 Hasil Uji Statistik F .....	46
Tabel 4. 10 Hasil Uji Statistik t .....	46



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	24



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1. Biodata Penulis .....	57



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pajak sebagai tanggungjawab wajib pajak yang mengharuskan atau memaksa terhadap Negara sesuai dengan keputusan Undang-Undang tanpa mendapatkan imbalan yang diperuntukkan dalam memenuhi kebutuhan Negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (UU No. 6 Tahun 1983 Pasal 1 (1)). Menjadi salah satu aspek penting dari penghasilan Negara, ajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mengalokasikan dana dan mendukung berbagai program pembangunan nasional (Anggraini & Destriana, 2022). Pemerintah memanfaatkan penerimaan dari pajak dalam melaksanakan pembangunan nasional (Darmawan & Sukartha, 2014).

Pembangunan nasional didukung oleh pendapatan pajak yang terus meningkat dari tahun ke tahun, di mana realisasi pendapatan pajak di Indonesia pada tahun 2019 mencapai Rp 1.332,1 triliun dan akan meningkat pada tahun 2022 menjadi Rp 1.716,8 triliun atau naik sebesar 1,28%. Pendapatan pajak mencakup segala penerimaan Negara yaitu penerimaan pajak domestic dan pendapatan pajak dari perdagangan internasional (Pasal 1 Ayat 3 UU No 14 Tahun 2015). Berikut adalah target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2019-2022.



**Tabel 1. 1** Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2019-2022

Tahun	Target Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)	(%)
2019	1.577,6	1.332,1	84%
2020	1.198,8	1.069,9	89%
2021	1.229,6	1.277,5	103,9%
2022	1.485	1.716,8	115,6%

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak

Dari tabel 1.1 dapat diketahuui jika pencapaian realisasi penerimaan pajak tahun 2019-2020 tidak melampaui target, tetapi di tahun 2021-2022 realisasi pajak dapat mencapai target. Walaupun realisasi pajak mencapai target, tetapi kenaikannya tidak begitu signifikan. Ada berbagai alasan mengapa pencapaian realisasi pajak tidak sesuai target, salah satunya dikarenakan terdapat wajib pajak yang melakukan pengurangan beban pajak. Melakukan pengurangan beban pajak bisa dengan berbagai cara yaitu, penyelundupan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Suandy, 2017). Penyelundupan pajak merupakan pelanggaran terhadap aturan perpajakan yang melibatkan wajib pajak dengan melakukan perbuatan penggelapan pajak. Sebaliknya, penghindaran pajak umumnya dianggap sah karena patuh terhadap aturan perpajakan yang berlaku.

Penghindaran pajak berdampak negatif terhadap negara karena dapat mengurangi pendapatan Negara. Pendapatan Negara digunakan dalam meningkatkan pendidikan, pembangunan infrastruktur publik, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jika pendapatan Negara berkurang maka pembangunan Negara dapat terhambat. Pembangunan Negara yang terhambat juga oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang menjadi penghambat



pembangunan negara karena kurangnya pendapatan Negara dari sektor pajak. Hal ini dikarenakan banyaknya penerapan penghindaran pajak yang dijalankan oleh beberapa perusahaan besar yang beroperasi di Indonesia.

PT Coca Cola adalah salah satu perusahaan yang pernah melakukan penghindaran pajak di Indonesia dengan menggunakan praktik *transfer pricing*. Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendeteksi jika terjadi pembengkakan biaya yang besar pada tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006. PT Coca Cola dicurigai memanipulasi pajak senilai Rp 49,24 miliar, dengan meningkatkan biaya iklan yang berakibat terhadap laba bersih yang diterima cenderung kecil sehingga menyebabkan pembebanan pajaknya juga kecil. Nilai tersebut didapatkan dari hasil pengurangan antara perhitungan yang dilakukan oleh DJP terkait pemasukan kena pajak PT Coca Cola senilai Rp 603,48 miliar dengan perhitungan PT Coca Cola senilai Rp 492,59 miliar (Wen & Muhammad, 2022). Kasus penghindaran pajak juga pernah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ternama di luar negeri yaitu Starbucks, Facebook, Google, dan Apple Inc (Puspita & Febrianti, 2017)

Dari contoh kasus tersebut dapat disimpulkan jika perusahaan akan berusaha melakukan segala tindakan agar memaksimalkan pendapatan laba rugi perusahaannya. Hal ini mengakibatkan perusahaan melakukan upaya penghindaran pajak. Perusahaan melakukan upaya penghindaran pajak yang bermaksud untuk mengoptimalkan laba perusahaan dan juga mengurangi kewajibannya dalam membayar pajak yang seharusnya.

Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak dalam upaya meningkatkan laba bersih mereka.

Salah satu faktor yang diyakini berdampak pada penghindaran pajak yang



dilakukan perusahaan yaitu ukuran perusahaan, *leverage*, dan kepemilikan institusional.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah meneliti faktor-faktor yang mungkin berdampak pada penghindaran pajak dengan menggunakan ukuran perusahaan sebagai proksi. Menurut penelitian (Suandy, 2017), ukuran perusahaan mempengaruhi penghindaran pajak karena transaksi yang melibatkan perusahaan besar biasanya lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan kecil. Akibatnya, perusahaan sering kali berupaya menghindari pajak dengan memanfaatkan celah yang sudah ada. Khususnya bagi perusahaan yang menggunakan Negara lain dengan tarif pajak lebih rendah untuk melakukan aktivitas lintas batas

Sementara itu, menurut (Wen & Muhammad, 2022) ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena perusahaan yang lebih besar sering kali menghasilkan pendapatan yang stabil dibandingkan bisnis yang lebih kecil. Oleh karena itu, perusahaan dengan basis aset yang lebih besar akan lebih siap dalam menangani dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika ukuran perusahaan melanggar undang-undang perpajakan saat ini, pihak berwenang akan mengambil tindakan hukum

Faktor kedua yaitu *leverage*. Menurut penelitian (Mahdiana & Amin, 2020), *leverage* berpengaruh pada penghindaran pajak karena penggunaan utang dapat menghasilkan laba yang lebih rendah dibanding menerbitkan saham. Hal ini yang menyebabkan kecenderungan pelaku usaha untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Sedangkan menurut (Wen & Muhammad, 2022), *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena semakin tinggi *leverage* tidak akan berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan. Manajemen suatu



perusahaan akan menyajikan informasi keuangan mengenai operasinya dengan lebih hati-hati jika semakin banyak organisasi tersebut berutang.

Adapun faktor lainnya yaitu kepemilikan institusional. Menurut penelitian (Xaviera et al., 2020), kepemilikan institusional berpengaruh pada penghindaran pajak karena dapat mempengaruhi niat institusi untuk mengatur bisnis berdasarkan besar kecilnya kepemilikan saham. Hal ini dilakukan untuk memajukan kepentingan pribadinya, khususnya dalam hal mengoptimalkan keuangan. Akibatnya, perusahaan cenderung ingin menghindari pembayaran pajak.

Sedangkan menurut (J. V. Putri & Suhardjo, 2022) kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Hal ini disebabkan kepemilikan institusional yang mempercayai dewan komisaris untuk mengawasi dan mengelola perusahaan turut mendorong efektivitas pengawasan dan pengelolaan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, penghindaran pajak dapat terjadi pada suatu perusahaan meskipun terdapat kepemilikan institusional.

Adapun teori yang dapat menjelaskan mengenai isu permasalahan penghindaran pajak yaitu teori akuntansi positif dan teori agensi. Teori akuntansi positif menggambarkan dan memperkirakan bagaimana suatu organisasi harus menjalankan prosedur akuntansinya. Manajemen bebas menerapkan teori ini ketika memilih praktik akuntansi yang akan mengoptimalkan nilai perusahaan. Teori akuntansi positif didasarkan pada tiga hipotesis yaitu hipotesis biaya politik, hipotesis perjanjian utang, dan hipotesis rencana bonus.

Selain itu, teori agensi juga merupakan teori yang sejalan dengan praktik penghindaran pajak. Teori agensi berperan ketika manajemen berupaya alkan pajak dengan menghindari pembayaran pajak untuk atkan nilai perusahaan, namun principal menentang penghindaran pajak



karena dianggap sebagai manipulasi laporan keuangan. Menurut teori agensi, konflik kepentingan antara fiskus (principal) dan manajemen perusahaan (agent) akan menimbulkan ketidakpatuhan salah satu pihak, sehingga berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Puspita & Febrianti, 2017).

Penulis melakukan penelitian kembali karena teori yang mendasari dan hasil penelitian sebelumnya tidak konsisten. Penelitian ini menggunakan tiga variabel penelitian yaitu ukuran perusahaan, leverage, dan kepemilikan institusional. Sedangkan, variabel yang digunakan pada penelitian yang dilakukan oleh (Wanda & Halimatusadiah, 2021) yaitu pada variabel independen yang digunakan oleh penelitian terdahulu yaitu solvabilitas dan provitabilitas. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Sinaga & Malau, 2021) menggunakan variabel independen yaitu capitas intensity dan inventory intensity. Pembaruan lainnya menyangkut rentang waktu tahun penelitian, dimana tahun 2019-2022 digunakan oleh peneliti.

Penelitian akan dilakukan pada perusahaan manufaktur industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan perusahaan manufaktur pada industry barang konsumsi didasarkan pada pengaruhnya yang besar terhadap pemungutan pajak dan perluasan perekonomian nasional (Kemenperin, 2021). Pencapaian kinerjanya yang sejauh ini tercatat stabil dan baik dalam hal peningkatan produktivitas, investasi, ekspor, dan penyerapan tenaga kerja, merupakan indikasi dari hal ini. Pada triwulan II tahun 2021, Kementerian Perindustrian melaporkan bahwa perusahaan manufaktur industry barang konsumsi memberikan kontribusi terbesar terhadap pembangunan

Indonesia, dengan kenaikan mencapai 7,07%. Industri ini mengalami tan tersebsar yaiu sebesar 1,35% (Kemenperin, 2021).



Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak, seperti yang ditunjukkan dalam judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”.

### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan?
2. Apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan.
2. Untuk menganalisis apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan.



Untuk menganalisis apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan.

## 1.4. Kegunaan Penelitian

### 1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dimaksud agar dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan berkontribusi dalam pengembangan hipotesis mengenai pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak perusahaan.

### 1.4.2. Kegunaan Praktis

#### 1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber penilaian dan evaluasi perusahaan di masa depan, khususnya perusahaan manufaktur di sektor industri barang konsumsi dan memperoleh manfaat dari penelitian ini.

#### 2. Bagi Fiskus

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi mengenai upaya perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak, sehingga dapat mempersempit celah-celah yang mungkin digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak.

#### 3. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan informasi tambahan terkait dengan penelitian ini.

## 1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



## BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori, penelitian terdahulu yang sejenis, kerangka pemikiran penelitian, dan hipotesis penelitian.

## BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas rancangan penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode dan analisis yang digunakan.

## BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Bab ini berisi penjelasan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data dan interpretasi hasil pengujian.

## BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran yang diberikan bagi penelitian selanjutnya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Landasan Teori

##### 2.1.1. Teori Akuntansi Positif

(Watts & Zimmerman, 2010) mengatakan bahwa teori akuntansi positif dapat dilihat dalam dua tingkatan. Tingkatan pertama, riset akuntansi dan aktivitas pasar modal termasuk dalam teori akuntansi. Sedangkan tingkatan kedua, teori akuntansi positif menggambarkan dan memperkirakan prosedur akuntansi secara menyeluruh untuk organisasi. Oleh sebab itu, teori akuntansi positif bertujuan untuk memperjelas mengapa bisnis memanfaatkan peluang untuk membuat keputusan akuntansi tertentu (Watts & Zimmerman, 2010).

Untuk membantu perusahaan dalam memilih kebijakan dan prosedur akuntansi yang mereka terapkan, teori akuntansi positif meramalkan dan menjelaskan peristiwa yang terjadi dalam praktik akuntansi (Watts & Zimmerman, 2010). Karena hal itu, peneliti akuntansi diharuskan memberikan data dan biaya transaksi. Teori akuntansi positif terdiri atas tiga hipotesis yaitu hipotesis rencana bonus (*bonus plan hypothesis*), hipotesis perjanjian utang (*debt covenant hypothesis*), dan hipotesis biaya politik (*political cost hypothesis*) (Watts & Zimmerman, 2010).

Menurut hipotesis rencana bonus (*bonus plan hypothesis*), manajer perusahaan biasanya memilih kebijakan dan praktik akuntansi yang akan memperpanjang umur perusahaan dalam waktu dekat. Sebaliknya, hipotesis utang (*debt covenant hypothesis*), mendalilkan bahwa kemungkinan in praktik dan prosedur akuntansi yang dapat meningkatkan laba pada



periode sekarang meningkatkan seiring dengan meningkatnya rasio utang terhadap modal perusahaan. Hal ini karena suatu perusahaan lebih besar kemungkinannya untuk melanggar ketentuan perjanjian utang dan menghadapi biaya teknis jika rasio utang terhadap modalnya lebih besar dan mendekati batas perjanjian utang.

Hipotesis terakhir yaitu hipotesis biaya politik (*political cost hypothesis*). Menurut teori ini, perusahaan besar biasanya melaporkan keuntungan yang lebih rendah atau tertunda dibandingkan perusahaan kecil. Hal ini disebabkan oleh biaya politik yang ditanggung oleh perusahaan sehubungan dengan undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan. Biaya politik yang harus ditanggung perusahaan meningkat seiring dengan bertambahnya ukuran perusahaan. Membayar pajak adalah salah satu biaya politik yang dihadapi perusahaan. Perusahaan harus membayar pajak untuk memnuhi tugas pemerintahannya.

### 2.1.2. Teori Agensi

Teori agensi adalah adanya perjanjian kontrak antara banyak pihak, khususnya principal dan agen, dimana pemilik (*principal*) memberikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen dan pemilik (*principal*) mempekerjakan agen untuk bekerja dan menyelesaikan tugas atas nama pemilik sesuai dengan kebutuhan principal (Jensen & Meckling, 1976). Memberi agen lebih banyak kekuasaan akan membuat manajemen belajar lebih banyak tentang bisnis dibandingkan dengan *principal*. Akibatnya, hal ini memaksa *principal* untuk mengambil tindakan dengan mengawasi seluruh keputusan manajemen untuk memastikan bahwa keputusan tersebut dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik principal dan bukan kepentingan manajemen (Ayu et al.,



Pemegang saham tentunya ingin mendapatkan hasil maksimal dari investasinya pada suatu perusahaan. Namun, untuk memperoleh keuntungan yang signifikan, hal ini memberikan tekanan pada manajemen untuk bekerja dengan baik. Manajemen akan melakukan segala cara untuk mencapai keuntungan yang besar, termasuk berusaha membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya (Ayu et al., 2017).

Upaya tersebut menimbulkan perbedaan kepentingan antara pemerintah yang sebagai pemungut pajak (*principal*) dan perusahaan yang bertindak sebagai *agent*. Perusahaan bertujuan untuk membayar pajak sesedikit mungkin sebagai wajib pajak agar dapat memaksimalkan keuntungannya, sedangkan pemerintah sebagai pemungut pajak ingin memungut pajak sebanyak-banyaknya guna meningkatkan penerimaan negara (Dewanti & Sujana, 2019). Perbedaan kepentingan dan sistem perpajakan di Indonesia yang mengharuskan adanya pelaporan dan perhitungan mandiri oleh wajib pajak, dapat mengakibatkan terjadinya penghindaran pajak dan perencanaan pajak sebagai salah satu cara untuk mengurangi pajak.

## 2.2. Pajak

### 2.2.1. Pengertian Pajak

Sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan No. 28 Tahun 2007 pajak diartikan sebagai iuran wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, yang dipaksakan oleh hukum tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk mendukung kebutuhan Negara demi memaksimalkan kesejahteraan rakyat.



Pajak menurut (Mardiasmo, 2018) adalah suatu iuran wajib yang i ke kas Negara yang langsung dibebankan pada pengeluaran-

pengeluaran umum dan berdasarkan peraturan perundang-undangan (yang dapat dipaksakan) dan tidak ada layanan timbal balik yang diterima.

Sedangkan menurut (P.J.A., 2009):

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) dan wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Berdasarkan dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi yang diberikan oleh warga Negara kepada Negara sebagai imbalan atas manfaat yang umumnya diberikan secara tidak langsung oleh pemerintah. Selain itu, dapat digunakan sebagai alat pengaturan sektor social ekonomi dan untuk membiayai kebutuhan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan Negara.

### 2.2.2. Dasar Hukum Pajak

Sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang DAsar 1945, dasar hukum perpajakan terdapat dalam Pasal 23 A ayat 2, yang menyatakan bahwasanya “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang”, yang menunjukkan jika definisi tersebut telah disetujui rakyat maupun pemerintah yang telah diformalkan menjadi Undang-Undang. Lebih lanjut, UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) sama-sama menguatkan landasan hukum pengenaan pajak yang terdapat dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa pajak dipungut atas pendapatan yang bersumber dari wajib badi dan/atau badan).



### 2.2.3. Fungsi Pajak

Pajak ialah pendapatan utama Negara guna mendanai semua pengeluaran, maka pajak memainkan peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan hal tersebut, terdapat berbagai fungsi pajak menurut (Mardiasmo, 2018) yaitu :

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*), pemerintah menggunakan pajak sebagai sumber pendanaan untuk membayar pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*regulerend*), pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau menetapkan kebijakan sosial dan ekonomi pemerintah.

### 2.2.4. Subjek Pajak

Subjek pajak adalah badan atau orang pribadi yang wajib membayar pajak. Pajak penghasilan dipungut kepada subjek pajak terhadap penghasilan yang dihasilkan sepanjang tahun pajak (Resmi, 2019). Berikut pengelompokan subjek pajak berdasarkan Undang-Undang 36 Tahun 2008 Pasal 2.

1. Orang pribadi yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang tinggal di Indonesia dalam satu tahun pajak dengan maksud untuk tinggal di Indonesia.
2. Badan yang berkantor pusat atau didirikan di Indonesia, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.



### 2.2.5. Objek Pajak

Segala sesuatu yang dikenakan pajak (yakni barang dagang, jasa, tindakan, atau situasi) dianggap sebagai objek pajak, menurut (Resmi, 2019). Objek pajak adalah penghasilan yang diartikan sebagai setiap tambahan kemampuan finansial yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik dari dalam maupun luar Indonesia, yang dapat dipergunakan dalam bentuk dan nama apapun untuk konsumsi atau untuk meningkatkan kekayaan Wajib Pajak. Definisi tersebut sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2009 Pasal 4.

### 2.3. Pembangunan Nasional

Pembangunan Nasional adalah usaha yang dilakukan oleh seluruh unsur Negara untuk mencapai tujuan negara (UU No. 25 Tahun 2004 Pasal 1). Menurut (Wardhana & Hendra, 2019), Pembangunan Nasional mengacu pada upaya yang disengaja dan terorganisir yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan manusia, kualitas, dan taraf hidup.

Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan makmur, baik secara materil maupun spiritual, yang didasarkan pada Pancasila. Ditekanankan bahwa inti dari Pembangunan Nasional adalah pengembangan manusia Indonesia secara menyeluruh. Oleh karena itu, landasan untuk melakukan pembangunan nasional terletak pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UU No. 5 Tahun 1984). Dengan menjaga keseimbangan antara kemajuan dan persatuan bangsa, maka pembangunan nasional dilakukan dengan menyeimbangkan kemajuan dengan kesatuan bangsa, dan didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi serta nilai-nilai kemanusiaan, keberlanjutan, keadilan, keperdulian lingkungan, dan persatuan (UU No. 25 Tahun 2004 Pasal 2).



## 2.4. Penghindaran Pajak

Menurut teori agensi, konflik kepentingan antara otoritas pajak dan perusahaan dapat menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak atau manajemen usaha, sehingga mendorong pelaku usaha untuk melakukan strategi penghindaran pajak (Puspita & Febrianti, 2017). Penghindaran pajak ialah upaya yang dilakukan untuk mengurangi serta mengefisiensi beban pajak dengan menghindari penerapan pajak dan mengalihkan ke transaksi yang tidak dikenakan pajak (Yohan & Pradipta, 2019).

Menurut (Pohan, 2013) penghindaran pajak ialah setiap tindakan yang sah serta aman yang dilakukan wajib pajak untuk menghindari pajak karena tidak melanggar undang-undang perpajakan apa pun. Hal ini disebabkan karena untuk menurunkan jumlah pajak yang terutang, strategi dan taktik seringkali menggunakan kelemahan-kelemahan (*grey area*) pada undang-undang peraturan perpajakan itu sendiri. Namun, masalah penghindaran pajak sering kali dianggap sebagai masalah yang bereda dan rumit, karena tindakan tersebut sah meskipun pemerintah tidak mendukungnya (Vivi et al., 2021).

James Kessler mengategorikan penghindaran pajak menjadi 2 (dua) kelompok, yakni berikut ini.

(a) penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*), yaitu tidak melakukan transaksi palsu, dengan itikad yang baik bukan untuk menghindari pajak. (b) Penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*), yaitu melakukan transaksi palsu, dengan itikad tidak baik untuk menghindari pajak.

## 2.5. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dijelaskan sebagai ukuran besar atau kecilnya suatu perusahaan (V. R. Putri & Putra, 2017). Ukuran perusahaan ialah kriteria yang digunakan untuk mengategorikannya sebagai besar atau kecil dalam beberapa



cara, salah satunya ditentukan oleh besarnya kepemilikan total asetnya (Anggraini & Destriana, 2022). Kedewasaan sebuah perusahaan tercermin dalam prospek jangka panjangnya, sebagaimana ditentukan oleh total asetnya (Dharma & Ardiana, 2016). Perusahaan-perusahaan yang lebih besar mendapatkan perhatian besar dari pemerintah berdasarkan keuntungan mereka, yang dapat menarik perhatian otoritas pajak untuk memberlakukan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku (Wijayanti & Merkusiwati, 2017).

Ukuran sebuah perusahaan mencerminkan kapasitasnya dalam membuat keputusan terkait pajak dan menunjukkan stabilitas serta kemampuannya untuk menjalankan aktivitas ekonomi (V. R. Putri & Putra, 2017). Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin menjadi pusat perhatian pemerintah (Kurniasih & Sari, 2013).

## 2.6. Leverage

*Leverage* ratio, juga dikenal sebagai Rasio Solvabilitas, membantu menentukan proporsi aset perusahaan yang dibiayai melalui utang (Olivia & Amah, 2019). Rasio ini, diperoleh dengan membandingkan utang perusahaan dengan asetnya. Rasio ini juga membantu perusahaan dalam menilai kemampuannya untuk melunasi utang jangka pendek dan jangka panjangnya jika likuidasi terjadi (Olivia & Amah, 2019).

*Leverage* mengacu pada seberapa besar sebuah perusahaan bergantung pada utang untuk mendanai operasinya. *Leverage* ialah rasio yang mencerminkan seberapa baik suatu perusahaan dapat membiayai asetnya dengan menggunakan utang jangka pendek dan jangka panjang (Anggraini & Destriana, 2022). Rasio tersebut digunakan untuk mengukur sejauh mana aset

perusahaan yang didanai oleh utang secara keseluruhan. Semakin besar



rasionya, maka semakin banyak modal pinjaman yang dipergunakan oleh bisnis untuk berinvestasi pada aset yang akan meningkatkan keuntungan bisnis.

## 2.7. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional mengacu pada kepemilikan saham oleh pemerintah, lembaga asing, dana perwalian, perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan institusi lainnya pada akhir tahun (Anggraini & Destriana, 2022). Kepemilikan institusional sebagaimana didefinisikan oleh (Waluyo et al., 2015), adalah presentase saham yang dimiliki oleh organisasi seperti perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi maupun perusahaan lain.

Hery (2017: 30) mengemukakan definisi kepemilikan institusional, bahwa.

“Kepemilikan institusional adalah jumlah proposi saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi seperti asuransi, bank, perusahaan insvestasi dan kepemilikan institusi lainnya. Kepemilikan institusional dapat mengurangi masalah keagenan yang terjadi karena pemegang saham institusional akan mengawasi perusahaan sehingga mengurangi tindakan manajer perusahaan yang mementingkan diri sendiri”.

## 2.8. Tinjauan Penelitian Terdahulu

**Tabel 2. 1** Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	(Sonia & Suparmun, 2019)	Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak	Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi secara signifikan oleh pengembalian aset dan kepemilikan institusional. Namun, faktor-faktor seperti rasio intensitas inventaris, leverage, keberadaan komisaris independen, ukuran perusahaan, rasio intensitas modal, pertumbuhan penjualan, dan kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap



			penghindaran pajak.
2	(Kalbuana & Yanti, 2020)	Pengaruh intensitas modal, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) periode 2015-2019	Hasil analisis menunjukkan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi secara positif oleh intensitas modal, sementara dipengaruhi secara negative oleh leverage, dan ukuran perusahaan tidak berdampak pada penghindaran pajak
3	(J. V. Putri & Suhardjo, 2022)	Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan non-keuangan di Bursa Efek Indonesia	Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh kepemilikan asing dan ukuran perusahaan, sementara komisaris independen, kepemilikan institusional, leverage, dan profitabilitas tidak memiliki dampak terhadap penghindaran pajak
4	(Suandy, 2017)	Faktor-faktor yang mempengaruhi <i>tax avoidance</i> pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI	Studi ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh return on assets dan pertumbuhan penjualan. Sebaliknya, faktor-faktor seperti ukuran perusahaan, leverage, rasio intensitas modal, komposisi komisaris independen, dan usia perusahaan tidak memengaruhi penghindaran pajak.
5	(Fitriani & Sulistyawati, 2020)	Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya <i>tax avoidance</i> pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh leverage, kompensasi kerugian fiskal, dan komite audit. Sebaliknya, return on assets (ROA), ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusional tidak mempengaruhi penghindaran pajak.
	(Inggraini & Estriana, 2022)	Penghindaran pajak pada perusahaan	Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak



		manufaktur	dipengaruhi oleh pertumbuhan penjualan. Namun, Faktor-faktor seperti ukuran perusahaan, keberadaan komite audit, leverage, kepemilikan institusional, dan return on assets tidak memengaruhi penghindaran pajak
7	(Xaviera et al., 2020)	Pengaruh kepemilikan institusional, profitabilitas, pertumbuhan penjualan dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2014-2018.	Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak diengaruhi oleh kepemilikan institusional, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan kompensasi rugi fiskal secara bersama-sama. Secara khusus, kepemilikan institusional dan profitabilitas memengaruhi penghindaran pajak, sedangkan pertumbuhan penjualan dan kompensasi rugi fiskal tidak memengaruhi penghindaran pajak
8	(Moeljono, 2020)	Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak	Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh <i>return on asset</i> , <i>leverage</i> , ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, kepemilikan institusional, dan risiko perusahaan.
9	(Langi Gabriella et al., 2023)	Pengaruh Capital Intensity, Leverage, Sales Growth, dan Market-To-Book-Ratio terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor kesehatan di Indonesia	Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi secara signifikan oleh leverage dan market-to-book-ratio, sedangkan intensitas modal dan pertumbuhan penjualan tidak memiliki efek signifikan terhadap penghindaran pajak
10	(Sunarsih et al., 2019)	Pengaruh profibiltas, leverage, corporate governance, dan ukuran perusahaan	Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi secara signifikan oleh profibiltas dan ukuran peprusahaan dalam arah negative, sedangkan leverage



		terhadap tax avoidance pada perusahaan yang tercatat di Jakarta Islamic index	memiliki dampak positif yang signifikan terhadap tax avoidance. Namun, tata kelola perusahaan dan komite audit tidak memainkan peran dalam penghindaran pajak.
--	--	---	--

## 2.9. Kerangka Pemikiran

Teori akuntansi positif dikembangkan oleh (Watts & Zimmerman, 2010) yang menyatakan bahwa perilaku manajer dan pengambilan keputusan dapat dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi tertentu. Menurut teori akuntansi, manajemen membuat keputusan tentang praktik akuntansi berdasarkan berbagai pertimbangan ekonomi. Dalam hipotesis rencana bonus menyebutkan bahwa manajer akan sering meningkatkan laba dalam upaya menerima bonus terbesar (Belkaoui, 2012). Hipotesis biaya politik menyatakan jika manajemen dapat menaikkan laba periode berjalan dengan mengurangi biaya politik melalui kecenderungan meminimalkan laba kena pajak dengan memilih metode akuntansi tertentu sesuai dengan tujuannya.

Sebaliknya teori agensi menurut (Jumailah, 2020) merupakan teori yang memperjelas pengaturan kontrak antara pihak yang mengambil keputusan dan orang yang melaksanakannya. Selain itu, teori agensi menegaskan bahwa terdapat pemisahan fungsi antara *principal* yang dalam hal ini yaitu pemerintah dan manajemen perusahaan (*agent*). Dimana perusahaan bertujuan untuk membayar pajak sesedikit mungkin sebagai wajib pajak agar dapat memaksimalkan keuntungannya. Sebaliknya, pemerintah dalam perannya sebagai otoritas pajak berupaya memaksimalkan penerimaan pajak guna meningkatkan pendapatan Negara (Dewanti & Sujana, 2019). Teori ini

ng *agent* untuk memaksimalkan pendapatan guna menghindari



penurunan kompensasi kinerja dan penanganan beban pajak yang tidak tepat (Salwah & Herianti, 2019).

Menurut (Pohan, 2013), salah satu pendekatan hukum yang efektif dalam mengelola kewajiban pajak adalah penghindaran pajak. Hal ini melibatkan upaya meminimalkan beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak yang tidak secara jelas ilegal. Keputusan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ukuran perusahaan, *leverage*, dan kepemilikan institusional.

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang memungkinkan suatu perusahaan dikategorikan berdasarkan beberapa cara, termasuk jumlah aset yang dimilikinya (Anggraini & Destriana, 2022). Ukuran suatu perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena perusahaan yang memiliki jumlah aset yang relatif besar biasanya menjadi lebih menguntungkan, sehingga berusaha meminimalkan kewajiban pajak mereka. Teori dan pernyataan tersebut selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (J. V. Putri & Suhardjo, 2022) jika ukuran perusahaan berpengaruh kepada penghindaran pajak. Begitupun dengan penelitian (Puspita & Febrianti, 2017), (Hapsari, 2019), dan (Ardyansah & Zulaikha, 2014) yang menyatakan jika ukuran perusahaan berpengaruh kepada penghindaran pajak. Meskipun demikian, penelitian ini tidak selaras dengan penelitian (Sonia & Suparmun, 2019), (Kalbuana & Yanti, 2020), dan (Tebiono & Sukadana, 2019).

*Leverage* adalah rasio yang membantu menilai tingkat utang yang digunakan untuk mendanai aset sebuah perusahaan (Olivia & Amah, 2019).

*Leverage* dapat digunakan untuk menurunkan beban pajak perusahaan melalui



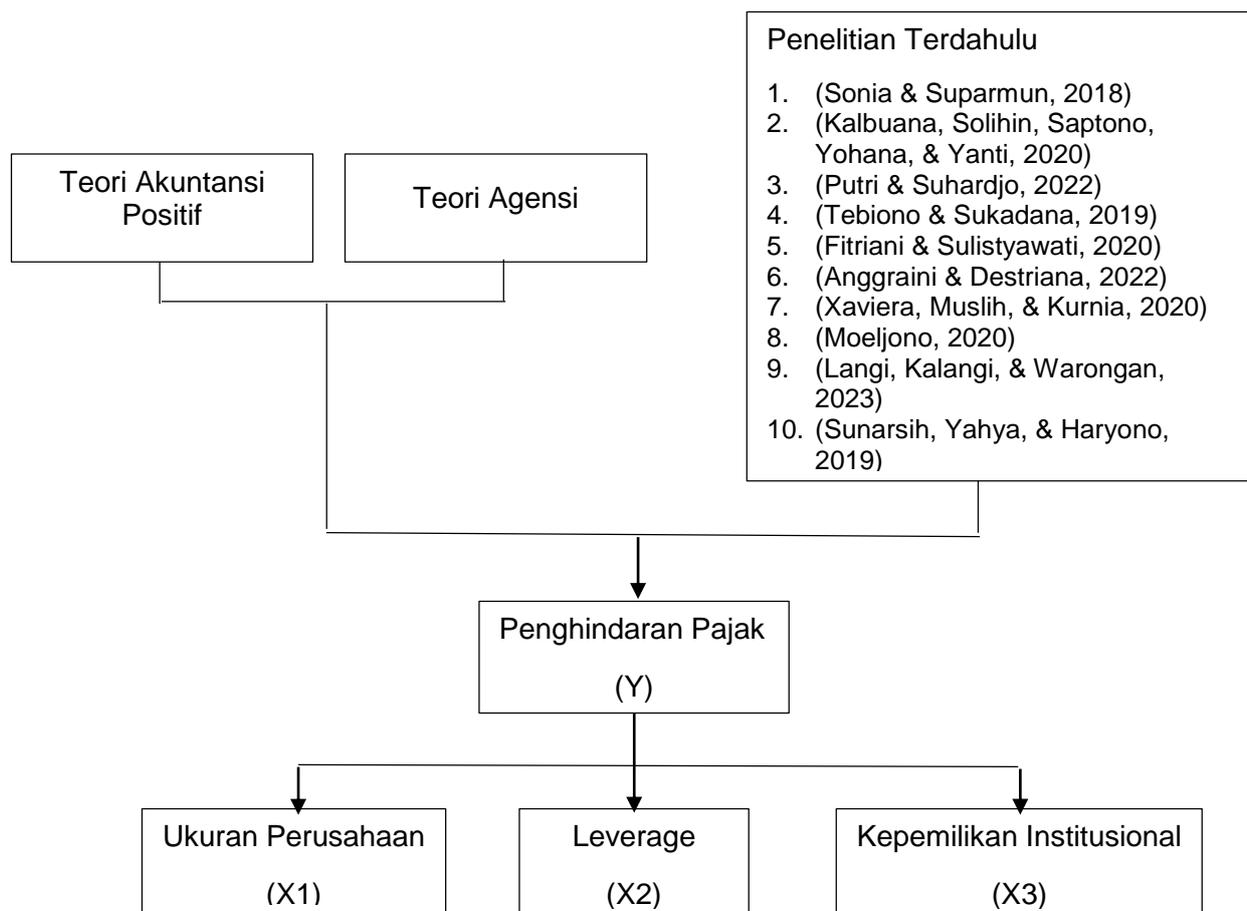
utang yang muncul dari utang, maka leverage dapat berperan dalam manajemen pajak oleh perusahaan. Teori dan pernyataan tersebut selaras

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Fitriani & Sulistyawati, 2020) bahwa leverage berpengaruh pada penghindaran pajak. Meski demikian, penelitian ini tidak sejalan dengan (J. V. Putri & Suhardjo, 2022), (Moeljono, 2020), dan (Anggraini & Destriana, 2022).

Kepemilikan institusional mengacu pada proporsi saham yang dimiliki oleh entitas seperti perusahaan asuransi, perusahaan investasi, bank maupun perusahaan lain (Tamrin & Maddatuang, 2019). Kepemilikan institusional adalah faktor yang dapat membantu perusahaan dalam menghindari pembayaran pajak. Semakin tinggi kepemilikan institusional, semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut dikelola untuk memaksimalkan pendapatan saat ini. Teori dan pernyataan tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sonia & Suparmun, 2019) dan (Xaviera et al., 2020) yang menyatakan jika kepemilikan institusional berpengaruh pada penghindaran pajak. Meskipun demikian, penelitian tersebut tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (J. V. Putri & Suhardjo, 2022), (Fitriani & Sulistyawati, 2020), (Anggraini & Destriana, 2022), dan (Moeljono, 2020).

Mengacu pada analisis teoritis yang disajikan dan merujuk pada penelitian sebelumnya, sebuah kerangka teoritis dapat dirumuskan, seperti yang digambarkan dalam diagram di bawah ini.





**Gambar 2. 1** Kerangka Pemikiran

## 2.10. Hipotesis Penelitian

### 2.10.1. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan ialah suatu ukuran yang mencerminkan skala suatu perusahaan, ditentukan oleh faktor-faktor seperti jumlah aset, jumlah penjualan, rata-rata jumlah penjualan dan rata-rata jumlah aset. Perusahaan dikategorikan ke dalam tiga kelompok yakni perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. Perusahaan besar pada umumnya selalu menghasilkan keuntungan yang besar.



alam teori akuntansi positif, dikatakan bahwa untuk menghemat pajak perusahaan besar dan yang memiliki keaslian biasanya menggunakan

metode akuntansi untuk memberikan kesan bahwa keuntungan atau pendapatan laba usahanya menurun (kecil) (Hery, 2017). Menurut (Suandy, 2017), segala upaya untuk meminimalkan atau memotong pajak merupakan salah satu bentuk penghindaran pajak dengan tujuan untuk memaksimalkan laba bersih sesudah pajak.

Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan yang besar lebih cenderung untuk melakukan penghindaran pajak guna mengurangi beban pajak mereka. Hal ini didukung oleh sebuah penelitian yang dilakukan oleh (Swingly & Sukartha, 2015) yang menunjukkan jika jumlah aset sebagai ukuran dari ukuran perusahaan secara signifikan memengaruhi penghindaran pajak.

Berdasarkan, penelitian (Hapsari, 2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut juga ditemukan pada penelitian (J. V. Putri & Suhardjo, 2022). Namun, pada penelitian (Fitriani & Sulistyawati, 2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H1: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

### **2.10.2. Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak**

Leverage adalah metric yang dapat digunakan untuk menggambarkan sejauh mana sebuah perusahaan mengandalkan utang untuk membiayai biaya operasionalnya (J. V. Putri & Suhardjo, 2022). Semakin banyak utang yang digunakan oleh sebuah perusahaan, maka semakin besar pula beban bunga yang dihadapinya. Hal ini dapat menyebabkan penurunan total kewajiban pajak perusahaan (Anggraini & Destriana, 2022).



Jika dikaitkan dengan teori akuntansi positif, maka manajemen akan menerapkan kebijakan akuntansi yang menghasilkan

keuntungan tertinggi. Salah satu strategi akuntansi yang tersedia bagi manajemen adalah memanfaatkan jumlah utang yang dimiliki untuk mendanai kegiatan operasional. Semakin besar penggunaan utang, semakin tinggi beban bunga yang harus ditanggung perusahaan. Akibatnya, beban bunga yang dapat dikurangkan dapat mengurangi pendapatan kena pajak perusahaan, sehingga mengakibatkan pengurangan pajak yang harus dibayarkan. Pendekatan ini merupakan salah satu langkah yang dapat diambil perusahaan karena sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada (Fadhila & Andayani, 2022).

Berdasarkan (Mahdiana & Amin, 2020) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut juga ditemukan pada penelitian (Anggraini & Destriana, 2022). Namun, pada penelitian (J. V. Putri & Suhardjo, 2022) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H2: *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

### 2.10.3. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam mengawasi, mendeskripsikan, dan memengaruhi manajer. Seperti yang diuraikan oleh (Nursari et al., 2016), kepemilikan institusional merujuk pada kepemilikan saham perusahaan oleh lembaga keuangan, termasuk bank, perusahaan asuransi, bank investasi, dan dana pensiun. Keterlibatan investor institusional seperti perusahaan efek, perusahaan asuransi, perbankan, perusahaan investasi, dana pensiun, dan kepemilikan institusi lain dalam kepemilikan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja manajemen (V. R. Putri & Putra, 2017).



Dalam konteks teori keagenan, dimana manajemen perusahaan (*agent*) untuk memaksimalkan keuntungan guna mencapai laba optimal dan

memenuhi ekspektasi pemegang saham (*principal*). Hal ini mendorong manajemen perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak, karena pajak dianggap mengurangi laba bersih (J. V. Putri & Suhardjo, 2022). Kepemilikan institusional yang semakin besar akan memiliki banyak insentif untuk mengawasi manajemen dan lebih banyak hak suara. Hal ini menimbulkan tekanan pada manajemen untuk menjalankan perusahaan secara efisien karena para pemegang saham mengharapkan pengembalian yang signifikan dalam bentuk keuntungan. Akibatnya manajemen memanfaatkan informasi perusahaan untuk membantu menghindari pembayaran pajak (Suhartonoputri & Mahmudi, 2022)

Berdasarkan (Dewi, 2019) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut juga ditemukan pada penelitian (Xaviera et al., 2020). Namun, pada penelitian (Moeljono, 2020) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H3: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1. Rencana Penelitian

Penelitian ini termasuk sebagai studi korelasi yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini mengaplikasikan perusahaan manufaktur industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia sebagai unit analisis. Penelitian ini memakai penghindaran pajak menjadi variabel dependen serta ukuran perusahaan, *leverage*, serta kepemilikan konstitusional menjadi variabel independen.

#### 3.2. Populasi dan Sampel

Populasi merujuk pada kelompok yang melibatkan subjek dan objek dengan jumlah serta ciri tertentu yang diketahui kemudian dihasilkan kesimpulannya oleh peneliti (Sugiyono, 2019). Perusahaan manufaktur industri barang konsumsi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019-2022 sebagai populasi pada penelitian ini.

Sampel ialah bagian dari populasi yang mewakili atau representatif (Sugiyono, 2019). Sampel didapatkan dengan memakai metode *purposive sampling*, ialah teknik pengambilan sampel yang memperhatikan faktor-faktor tertentu dengan begitu hanya perusahaan yang sesuai kriteria penelitian termasuk dalam sampel. Kriteria yang harus dipenuhi yakni sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2019 - 2022.
2. Perusahaan yang mempunyai nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) < 1
3. Perusahaan yang mempunyai kepemilikan saham institusional



4. Informasi yang dibutuhkan lengkap untuk mengukur variabel penelitian.

### 3.3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini memakai jenis data kuantitatif yang memakai data sekunder sebagai sumber data. Data sekunder yakni data yang didapatkan tidak secara langsung oleh peneliti, namun menggunakan perantara orang lain dan dokumen sebelumnya (Sugiyono, 2020). Di penelitian ini data ditemukan dari laporan tahunan perusahaan manufaktur industri barang konsumsi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) di tahun 2019-2022 dan telah dipublikasikan. Data diunduh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan website resmi perusahaan.

### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Melakukan teknik pengumpulan data pada situasi yang alamiah, bersumber dari data primer, serta lebih banyak menggunakan observasi partisipatif, *interview*, dan dokumentasi (Sugiyono, 2018). Teknik pengumpulan data mencakup dokumentasi, wawancara, observasi, dan angket, (Sugiyono, 2018). Di penelitian ini pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, yaitu teknik untuk mendapatkan data dan informasi berbentuk laporan serta penjelasan yang bisa menunjang penelitian dalam bentuk dokumen, arsip, tulisan angka, gambar serta buku (Sugiyono, 2018).

### 3.5. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

#### 3.5.1. Variabel Penelitian

Penelitian ini memakai 2 jenis variabel, yakni variabel dependen serta variabel independen. Penghindaran pajak sebagai variabel dependen sementara variabel independen yakni ukuran perusahaan, *leverage*, dan kepemilikan



ional.

### 3.5.2. Definisi Operasional

#### 1. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak yakni tindakan perusahaan dalam meminimalkan kewajiban pajaknya dengan tidak adanya pelanggaran pada peraturan yang disepakati (Anggraeni & Febrianti, 2019). Di penelitian ini, *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dipakai guna mengevaluasi penghindaran pajak yang diutarakan oleh (Hanlon & Heitzman, 2010).

*Cash Effective Tax Rate* (CETR) adalah pengeluaran kas dari hasil pembagian beban pajak terhadap keuntungan (Puspita & Febrianti, 2017). Penggunaan CETR dalam pengukuran bertujuan untuk mendeskripsikan presentase total pendapatan sebelum pajak yang digunakan oleh perusahaan guna membayar pajak penghasilan. Jika nilai CETR semakin besar, jadi tingkat penghindaran pajak perusahaan semakin minim (Budiman & Setiyono, 2012). Nilai CETR yang dipakai adalah yang memiliki nilai < 1. Berikut rumus untuk menafsirkan CETR yakni sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

#### 2. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dideskripsikan sebagai ukuran di mana perusahaan bisa dikelompokkan ukurannya berdasarkan besar kecilnya aset yang dipunyai (Ardyansah & Zulaikha, 2014). Pada penelitian ini, pengukuran ukuran perusahaan memakai keseluruhan aset . Oleh karena itu, ukuran perusahaan didelegasikan dengan Log keseluruhan aset.

Penilaian ukuran perusahaan yang didelegasikan dengan log keseluruhan



anggap mempunyai tingkat keseimbangan lebih jika dibandingkan dengan lainnya serta memiliki kesinambungan antar periode sebelum dan

berikutnya (Prakosa, 2014). Penggunaan log (Ln) bertujuan untuk meminimalkan variasi data yang berlebihan dengan tidak melakukan perubahan proporsi dari nilai yang sebenarnya (Waluyo, Basri, & Rusli, 2015). Berikut rumus untuk menafsirkan ukuran perusahaan yaitu berikut ini:

$$Size = Ln (Total Aset)$$

### 3. Leverage

*Leverage* mencakup pemakaian berbagai sumber pembiayaan oleh perusahaan, yang melibatkan sumber dana jangka panjang ataupun jangka pendek. Umumnya, penggunaan *leverage* guna mendeskripsikan kapabilitas perusahaan dalam menggunakan aset dalam meningkatkan pendapatan perusahaan (Nursari, 2017). Pada penelitian ini, perhitungan *leverage* memakai Debt to Equity Ratio.

Penghitungan menggunakan Debt to Equity Ratio (DER) bertujuan guna melihat bagaimana struktur utang dan ekuitas perusahaan, sehingga bisa diketahui perimbangan antara utang dan ekuitas perusahaan dan sejauh mana perusahaan mampu membayar tagihan atau kredit. Berikut rumus untuk mengukur *Leverage* yaitu sebagai berikut:

$$Debt\ to\ Equity\ Ratio = \frac{Total\ Liabilities}{Total\ Ekuitas}$$

### 4. Kepemilikan Konstitusional

Kepemilikan institusional mempunyai peran esensial dalam mengamati kinerja manajemen dikarenakan dapat mengontrol keefektifan seluruh pengambilan keputusan oleh manajer (Wijayanti & Merkusiwati, 2017).

Kepemilikan institusional yakni saham perusahaan yang dipunyai institusi ataupun misalnya bank, perusahaan asuransi, investor asing, dan kepemilikan lain lainnya (Gazali, Karamoy, & Gamaliel, 2020).



Perhitungan yang dipakai untuk mengukur kepemilikan saham yakni dengan mengadu keseluruhan saham yang dimiliki institusi dan keseluruhan saham yang beredar (Wijayanti & Merkusiwati, 2017) Kepemilikan institusional dihitung dengan rumus berikut ini:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Total Saham yang Dimiliki Institusi}}{\text{Total Saham yang Beredar}}$$

### 3.6. Metode Analisis Data

#### 3.6.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menjelaskan data melalui mean, *sum*, deviasi standar, minimum, maksimum, kurtosis, *range*, dan kemencengan distribusi (Ghozali I. , 2018). Penggunaan teknik analisis deskriptif dengan angka minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi dari tiap variabel di penelitian ini. Penggunaan metode ini guna menampilkan fenomena tentang variabel penelitian dengan data yang telah dikumpulkan.

### 3.7. Pengujian Asumsi Klasik

#### 3.7.1. Uji Normalitas Data

Pengujian normalitas data memiliki tujuan guna melihat antara variabel independen dan variabel dependen apakah mengalami pembagian normal atau tidak normal dalam model regresi. Model regresi dikatakan layak yaitu mempunyai pendistribusian normal atau hampir normal (Ghozali I. , 2013). Uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan tingkat signifikansi 0,05 akan dilakukan guna menguji normalitas data.

#### 3.7.2. Uji Multikolinearitas



pengujian multikolinearitas dilakukan guna meninjau apakah ada korelasi antara variabel independen di model regresi. Model regresi yang layak

harusnya antar variabel bebas tidak mengalami hubungan. Apabila ada hubungan antara variabel bebas, jadi variabel tersebut tidak bersifat orthogonal. Variabel orthogonal yakni variabel bebas yang angka hubungannya sama dengan nol antar sesama variabel independen. Penggunaan angka *tolerance* serta angka *variance inflation factor* (VIF) ini bisa terbukti bila ada atau tidak adanya multikolonieritas di model regresi (Ghozali I. , 2013). Multikolinearitas ditunjukkan dengan nilai *tolerance*  $\leq 0,10$  atau sama dengan  $VIF \geq 10$ (Ghozali, 2011).

### 3.7.3. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian Heteroskedastisitas digunakan agar mengobservasi apakah terdapat perbedaan variance dari residual pengamatan di dalam model regresi. Jika variance dari residual pengamatan tetap, maka kondisinya disebut homoskedastisitas. Tetapi, bila tidak sama dinamakan heteroskedastisitas. Model regresi yang baik yakni model yang tidak mengalami heteroskedastisitas atau dinamakan sebagai homoskedastisitas. Regresi nilai absolut residu pada variabel independen adalah dengan uji Glejser yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas. Jika nilai signifikansinya  $> 0,05$  maka tidak timbul heteroskedastisitas. Namun, jika nilai signifikansinya  $< 0,05$  maka akan timbul heteroskedastisitas(Ghozali, 2018).

### 3.8. Analisis Regresi Linear Berganda

Metode analisis data yakni metode yang dipergunakan saat mengolah semua variabel yang ada, dengan maksud guna memperoleh hasil penelitian yang bermanfaat dan mencapai sebuah kesimpulan. Metode yang diaplikasikan

ian ini yakni analisis regresi linear berganda yang mengkaji tingkat an diantara satu variabel dependen serta dua dan/atau lebih variabel



independen (Sekaran & Bougie, 2017). Analisis regresgi linear berganda adalah model regresi yang diterapkan untuk melihat arah dan bagaimana variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen (Ghozali I. , 2018). Penggunaan model analisis regresi untuk menjelaskan pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, dan kepemilikan institusional kepada penghindaran pajak dinyatakan dengan rumus berikut ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y	= <i>Cash Effective Tax Rate</i>
$\alpha$	= Koefisien konstanta
$\beta_{1,3}$	= Koefisien regresi variabel independen
$X_1$	= Ukuran perusahaan ( <i>Size</i> )
$X_2$	= <i>Leverage (Debt to Equity Ratio)</i>
$X_3$	= Kepemilikan Institusional
$\varepsilon$	= <i>error</i>

### 3.9. Uji Hipotesis

#### 3.9.1. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kapabilitas variabel-variabel independen. Nilai  $R^2$  berkisar antara 0 sampai 1. Nilai  $R^2$  yang rendah menunjukkan sangat terbatasnya kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Variabel dependen tidak dipengaruhi oleh variabel independen jika  $R^2$  sama dengan 0 dan variabel dependen dipengaruhi sempurna oleh variabel independen jika  $R^2$  mendekati angka 1. Model ini mengurangi kesalahan seminimal mungkin, sehingga  $R^2$  mendekati 1. Hal ini akan membantu estimasi regresi agar lebih menyerupai scenario sebenarnya.



#### Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

penggunaan F-test guna mengevaluasi kemampuan model regresi bisa diterapkan guna memperkirakan belanja modal. Selain itu, F-test

berfungsi dalam mengevaluasi apakah keseluruhan variabel independen yang dimuat ke dalam model regresi memiliki dampak kepada variabel dependen secara bersamaan (Ghozali I. , 2013). Karakteristik pengujiannya (Uji-F) yakni berikut ini:

1.  $H_0$  ditolak yang menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak layak diterapkan dalam penelitian jika nilainya  $> 0.05$  atau nilai signifikansi lebih dari nilai  $\alpha 0,05$ .
2.  $H_0$  diterima yang menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini layak digunakan dalam penelitian jika nilai  $= 0.05$  atau jika nilai signifikansinya kurang dari atau sama dengan nilai  $\alpha 0,05$ .

### 3.9.3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Penggunaan uji signifikansi parameter individual dipakai guna menilai apakah variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen tertentu, dengan anggapan bahwa variabel independen lainnya tetap (Ghozali I. , 2013). Karakteristik pengujian hipotesis ialah seperti berikut ini:

1.  $H_0$  ditolak yang menunjukkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependennya sendiri jika nilainya  $>0.05$  atau nilai signifikansinya lebih dari nilai  $\alpha 0,05$ .
2.  $H_0$  diterima yang menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara independen jika nilai  $= 0.05$  atau jika nilai signifikansinya lebih kecil dari atau sama dengan nilai  $\alpha 0,05$ .



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Deskriptif Data

##### 4.1.1. Deskripsi Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur industri barang konsumsi yang terdaftar dan telah *go public* di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama kurun waktu 2019-2022. Karena statusnya sebagai bursa terbesar dan signifikan di Indonesia, BEI dipilih sebagai sumber data utama. Dengan menggunakan kriteria yang diuraikan pada bab sebelumnya, teknik *purposive sampling* digunakan untuk memilih sampel. Prosedur yang digunakan untuk memilih sampel penelitian ini ditampilkan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4. 1** Kriteria Pemilihan Sampel

No.	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan manufaktur industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2019 sampai 2022.	51
2	Perusahaan yang memiliki nilai Cash Effective Tax Rate (CETR) > 1 selama tahun 2019-2022	(19)
3	Perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan institusional	(4)
4	Jumlah perusahaan yang memiliki data tidak lengkap selama periode 2013-2015	(2)
	Jumlah perusahaan yang menjadi sampel	26
	Tahun penelitian	4
	Jumlah sampel terpilih	104
	<i>Outlier</i>	11
	Total data yang dapat diolah	93

Sumber: Data sekunder yang diolah

Pada tabel 4.1. dapat dilihat setelah data mengalami pengolahan pada SPSS, terdapat data outliers sebanyak 11 data. Oleh karena itu, data dikeluarkan dari sampel penelitian. Berdasarkan tabel 4.1 dijelaskan



bahwa terdapat sampel perusahaan manufaktur industri barang konsumsi yang dijadikan data penelitian. Periode penelitian yang digunakan adalah 4 (empat) tahun, yaitu 2019, 2020, 2021, dan 2022. Sehingga total sampel yang diteliti sebanyak 104 data laporan tahunan perusahaan manufaktur. Tetapi, dengan adanya data outlier dikeluarkan dari sampel penelitian, menyebabkan data yang dapat diolah berjumlah 93 data.

#### 4.1.2. Deskripsi Sampel Penelitian

Pada penelitian ini, sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling, yaitu berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Berikut nama-nama perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini:

**Tabel 4. 2** Perusahaan Sampel

No.	Kode Saham	Nama Perusahaan
1	ADES	Akasha Wira Internasional Tbk Tbk.
2	CEKA	PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.
3	CLEO	PT Sariguna Primatirta Tbk.
4	COCO	PT Wahana Interfood Nusantara Tbk.
5	DLTA	Delta Djakarta Tbk.
6	DVLA	Darya-Varia Laboratoria Tbk.
7	GGRM	Gudang Garam Tbk.
8	HMSP	HM Sampoerna Tbk.
9	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.
10	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.
11	KINO	PT Kino Indonesia Tbk.
12	KLBF	Kalbe Farma Tbk.
13	MBTO	Martina Berto Tbk.
14	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk.
15	MRAT	Mustika Ratu Tbk.
16	PSGO	PT Palma Serasih Tbk.
17	PYFA	PT Pyridam Farma Tbk.
18	ROTI	PT Nippon Indosari Corpindo Tbk.
19	SIDO	PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk.
20	SKLT	Sekar Laut Tbk.
21	STTP	PT Siantar Top Tbk.
22	TCID	Mandom Indonesia Tbk.
23	TSPC	Tempo Scan Pacific Tbk.
24	UNVR	Unilever Indonesia Tbk.
25	WIIM	Wismilak Inti Makmur Tbk.
26	WOOD	PT Integra Indocabinet Tbk.



## 4.2. Analisis Data Penelitian

Metode analisis regresi linear berganda digunakan sebagai metode analisis. yang bertujuan guna mendapatkan penjelasan secara keseluruhan tentang dampak variabel independen, yakni ukuran perusahaan, leverage, dan kepemilikan institusional kepada variabel dependen, yakni penghindaran pajak.

### 4.2.1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menyediakan penjelasan atau deskripsi mengenai data berupa nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi yang didapatkan dari variabel penelitian. Variabel-variabel pada penelitian ini diuji secara statistik dengan memakai program SPSS seperti di Tabel 4.3.

**Tabel 4. 3** Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penghindaran Pajak	93	.19	.28	.2459	.01568
Ukuran Perusahaan	93	2.61	3.43	3.1476	.25483
Leverage	93	.11	3.58	.7820	.72747
Kepemilikan Institusional	93	.09	.93	.7437	.17355
Valid (N) listwise	93				

Sumber: Data sekunder yang diolah

#### a. Ukuran Perusahaan

Variabel ukuran perusahaan sebagai variabel independen di penelitian ini yang diukur menggunakan jumlah aset perusahaan yang di logaritma natural (Log n). dengan menggunakan IBM SPSS Statistics, pengolahan data dilakukan seperti yang ditunjukkan di tabel 4.3, variabel ukuran perusahaan dengan jumlah data sebanyak 93 data (N), analisis statistik deskriptif pada variabel ukuran perusahaan memperlihatkan standar deviasi bernilai 0,25483 dengan *mean* atau

bernilai 3,1476. ini mengartikan bahwa kebanyakan perusahaan ur industri barang konsumsi mempunyai ukuran yang relatif serupa.



Dari 93 data penelitian yang ditampilkan pada tabel 4.3, Akasha Wira Internasional Tbk. memiliki nilai ukuran perusahaan terkecil yakni 2,61. Sedangkan Kalbe Farma Tbk. memiliki nilai terbesar yakni 3,43. Nilai minimum menunjukkan bahwa Akasha Wira Internasional Tbk. memiliki ukuran perusahaan terkecil di antara seluruh perusahaan yang diteliti. Sedangkan nilai maksimum menunjukkan Kalbe Farma Tbk. memiliki ukuran perusahaan terbesar selama periode penelitian

#### **b. Leverage**

Dalam penelitian ini variabel leverage berperan sebagai variabel independen dan dinilai melalui Debt to Equity Ratio (DER) yang membagi antara jumlah utang suatu perusahaan dan total asetnya, hal ini menunjukkan sejauh mana perusahaan tersebut didanai oleh utang. Data yang diolah menggunakan IBM SPSS Statistics seperti tergambar di tabel 4.3 memperlihatkan jika variabel leverage dengan 93 data mempunyai nilai rata-rata berjumlah 0,7820 serta standar deviasi berjumlah 0,72747. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa kebanyakan perusahaan manufaktur barang konsumsi di Indonesia dibiayai melalui utang

Dari 93 data penelitian yang ditampilkan pada tabel 4.3, perusahaan yang mempunyai angka leverage terendah berjumlah 0,11 yakni PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk, sementara yang mempunyai angka leverage tertinggi sebesar 3,58 yakni PT Unilever Indonesia Tbk. Nilai yang paling rendah mengartikan jika perusahaan tersebut mempunyai penemuan *leverage* yang paling sedikit daripada perusahaan lain pada tahun penelitian. Sementara nilai tertinggi mengartikan bahwa perusahaan mempunyai penggunaan *leverage* terbesar

dengan perusahaan lain di masa penelitian.



### c. Kepemilikan Institusional

Variabel kepemilikan institusional merupakan variabel independen dalam penelitian ini, yang diukur dengan membandingkan antara total kepemilikan saham oleh instansi dengan total saham beredar. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan IBM SPSS Statistics, seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.3. Variabel kepemilikan institusional dengan 93 data penelitian memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,17355 dengan rata-rata (mean) sebesar 0,7437. Hal ini berarti kepemilikan perusahaan manufaktur industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia (BEI) cenderung dikuasai oleh instansi, baik instansi dalam negeri maupun instansi asing.

Dari 93 data penelitian yang disajikan pada tabel 4.3, Wismilk Inti Makmur Tbk teridentifikasi sebagai perusahaan dengan nilai kepemilikan institusional terendah sebesar 0,09, sedangkan Sekar Laut Tbk. memiliki nilai tertinggi sebesar 0,93. Nilai minimum tersebut menandakan bahwa Wismilk Inti Makmur Tbk. memiliki deteksi kepemilikan institusional paling sedikit daripada perusahaan lain saat periode penelitian. Sebaliknya, nilai tertinggi menunjukkan Sekar Laut Tbk. memiliki deteksi kepemilikan institusional tertinggi dibandingkan perusahaan lain pada periode penelitian.

### d. Penghindaran Pajak

Variabel penghindaran pajak merupakan variabel dependen dalam penelitian ini, yang diukur dengan menggunakan *cash effective tax rate* untuk menentukan besarnya penghindaran pajak yang terdeteksi pada tahun tertentu. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan IBM SPSS



, seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.3. Variabel penghindaran pajak 93 data penelitian memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,1568 dengan

rata-rata (mean) sebesar 0,2459. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan manufaktur industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada sampel penelitian telah melakukan kewajiban perpajakan badannya sesuai dengan tarif pajak yang telah ditetapkan pemerintah dengan rata-rata sebesar 24,59%..

Dari 93 data penelitian yang ditunjukkan dari tabel 4.3, perusahaan yang memiliki nilai minimum untuk penghindaran pajak sebesar 0,19. Sedangkan nilai maksimum sebesar 0,28. Hal ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak terendah terdapat pada tahun 2022 yang dimiliki oleh Wismilak Inti Makmur Tbk, sedangkan penghindaran pajak tertinggi terdapat pada tahun 2019 yang dimiliki oleh PT Unilever Indonesia Tbk.

#### **4.3. Hasil Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik dilakukan dengan menggunakan analisis regresi terhadap variabel independen dan variabel dependen.

##### **4.3.1. Hasil Uji Normalitas**

Tujuan dilakukan uji normalitas ialah guna menyimpulkan apakah variabel residual atau variabel pengganggu dalam model regresi mempunyai distribusi normal. Dalam penelitian ini uji Kalmogorov-Smirnov (K-S) yang dipergunakan ialah uji non-parametrik. tabel 4.4 menampilkan hasil uji normalitas Kalmogorov-Smirnov (K-S).



**Tabel 4. 4** Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

		Unstandardized Residual	
N		93	
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	.00584135	
Most Extreme Differences	Absolute	.058	
	Positive	.056	
	Negative	-.058	
Test Statistic		.058	
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>		.200 <sup>d</sup>	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) <sup>e</sup>	Sig.	.624	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.612
		Upper Bound	.637

Sumber: data yang diolah

Berdasarkan tabel 4.4, hasil uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) memperlihatkan jika distribusi data bersifat normal. Hal ini bisa dilihat oleh nilai yang lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  dan ambang signifikansi sebesar 0,200. Ini mengindikasikan jika data mengikuti distribusi normal, yang memenuhi asumsi klasik uji normalitas untuk model penelitian ini.

#### 4.3.2. Uji Multikolinearitas

Untuk membuktikan apakah model regresi menemukan hubungan antar variabel independen, seseorang dapat melakukan uji multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas yang ditampilkan dalam tabel 4.5 adalah sebagai berikut.

**Tabel 4. 5** Hasil Uji Multikolinearitas

			Collinearity Statistics		
Model		t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	16.477	.001		
	Ukuran Perusahaan	2.510	.014	.846	1.182
	Average	8.326	.001	.957	1.045
	Keperwakilan institusional	20.202	.001	.862	1.160



Sumber : data yang diolah

Berdasarkan tabel 4.5, hasil uji multikolinearitas, toleransi lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, yang menunjukkan jika multikolinearitas tidak terjadi pada variabel ukuran perusahaan, leverage, dan kepemilikan institusional.

#### 4.3.3. Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dilakukan uji heteroskedastisitas ialah guna menentukan apakah ada ketidaksetaraan variabel pada penelitian antara residual dari berbagai observasi. Data yang bebas dari heteroskedastisitas membuat model regresi yang baik. Hasil uji heteroskedastisitas yang tercantum dalam tabel 4.6 adalah sebagai berikut.

**Tabel 4. 6** Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.003	.006		-.431	.668
	Ukuran Perusahaan	.002	.002	.158	1.396	.166
	Leverage	.001	.001	.139	1.304	.195
	Kepemilikan Institusional	.000	.002	-.021	-.192	.848

Sumber : data yang diolah

Berdasarkan tabel 4.6, hasil uji heteroskedastisitas, nilai signifikansi model uji lebih dari 0,05. Oleh sebab itu, dapat diartikan jika tidak ada masalah heteroskedastisitas.

#### 4.4. Analisis Regresi Linear Berganda

Tujuan dari uji hipotesis ini ialah guna menentukan seberapa besar faktor-faktor independen berpengaruh kepada variabel dependen. Perhitungan analisis

ini memakai perangkat lunak SPSS. Berikut adalah temuan perhitungan



**Tabel 4. 7** Hasil Analisis Regresi

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.003	.006		-.431	.668
	Ukuran Perusahaan	.002	.002	.158	1.396	.166
	Leverage	.001	.001	.139	1.304	.195
	Kepemilikan Institusional	.000	.002	-.021	-.192	.848

Sumber : data yang diolah

$$Y = -0,003 + 0,002 X_1 + 0,001 X_2 + 0,000 X_3 + \varepsilon$$

Hasil tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstan adalah -0,003, menunjukkan nilai negatif. Ini memperlihatkan jika semua variabel independen dinilai konstan, penghindaran pajak akan berada pada -0,003.
2. Koefisien untuk ukuran perusahaan ( $X_1$ ) adalah positif, dengan nilai 0,002. Ini berarti bahwa untuk setiap peningkatan unit dalam ukuran perusahaan, penghindaran pajak akan meningkat sebesar 0,002 dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan. Koefisien yang bernilai positif ini menunjukkan bahwa terjadinya hubungan positif antara ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak. Semakin meningkat nilai ukuran perusahaan maka akan semakin meningkat nilai penghindaran pajak.
3. Koefisien untuk leverage ( $X_2$ ) adalah positif, dengan nilai 0,001. Ini berarti bahwa untuk setiap peningkatan unit dalam leverage, penghindaran pajak akan bertambah sebesar 0,001 dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan. Koefisien yang bernilai positif ini menunjukkan bahwa terjadinya hubungan positif antara *leverage* dengan



penghindaran pajak. Semakin meningkat nilai *leverage* maka akan semakin meningkat nilai penghindaran pajak.

4. Koefisien untuk kepemilikan institusional (X3) adalah positif, dengan nilai 0,000. Ini berarti bahwa untuk setiap peningkatan unit dalam kepemilikan institusional, penghindaran pajak akan meningkat sebesar 0,000 dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan. Koefisien yang bernilai positif ini menunjukkan bahwa terjadinya hubungan positif antara kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak. Semakin meningkat nilai kepemilikan institusional maka akan semakin meningkat nilai penghindaran pajak.

#### 4.5. Hasil Uji Hipotesis

##### 4.5.1. Uji Koefisien Determinasi (Uji $R^2$ )

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) mengindikasikan keandalan model untuk menggambarkan perubahan dalam variabel dependen. Rentangnya dari nol hingga satu, dengan nilai yang mendekati satu membuktikan jika sebagian besar informasi yang diperlukan guna meramalkan perubahan dalam variabel dependen disediakan oleh variabel independen (Ghozali, 2016). Temuan uji koefisien determinasi diuraikan di bawah ini.

**Tabel 4. 8** Hasil Uji Koefisien Determinasi (Uji  $R^2$ )

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.928 <sup>a</sup>	.861	.857	.00594

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan Tabel 4.8, terlihat bahwa nilai Adjusted R Square adalah 0,857,

mbuktikan jika 85,7% dari penghindaran pajak ditentukan oleh ukuran an, leverage, dan kepemilikan institusional. Sisa 14,3% terpengaruhi



oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti tata kelola perusahaan, profitabilitas, intensitas kapasitas, struktur kepemilikan, dan intensitas inventaris.

#### 4.5.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Penggunaan uji statistik F guna menilai apakah seluruh variabel independen memiliki efek bersama (simultan) kepada variabel dependen dalam model regresi.

**Tabel 4. 9** Hasil Uji Statistik F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.019	3	.006	184.199	.001 <sup>b</sup>
	Residual	.003	89	.000		
	Total	.023	92			

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan tabel 4.8, menunjukkan bahwa pada tingkat signifikansi 0,001, nilai F yang dihitung untuk hasil uji statistik F adalah 184,199. Ini membuktikan jika ukuran perusahaan, leverage, dan kepemilikan institusional secara bersama-sama mempengaruhi variabel penghindaran pajak. Hal tersebut disebabkan tingkatan signifikansinya jauh di bawah 0,05.

#### 4.5.3. Uji Statistik Parameter Individual (Uji Statistik t)

Penggunaan uji statistik t ialah guna melihat sejauh mana kontribusi setiap variabel independen terhadap variasi yang diinduksi oleh variabel dependen (Ghozali, 2016). Hasil uji statistik t ialah sebagai berikut.



**Tabel 4. 10** Hasil Uji Statistik t

Model		Unstandardized Coefficients		Standard ized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.162	.010		16.477	.001
	Ukuran Perusahaan	.007	.003	.108	2.510	.014
	Leverage	.007	.001	.336	8.326	.001
	Kepemilikan Institusional	.078	.004	.859	20.202	.001

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan tabel 4.9, ukuran perusahaan mempunyai nilai yang secara statistik signifikan lebih kecil dari  $\alpha$  ( $0,001 < 0,05$ ), mengkonfirmasi H1, yang mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan secara signifikan memengaruhi kecenderungan penghindaran pajak

*Leverage* memiliki nilai signifikansi kurang dari  $\alpha$  ( $0,014 < 0,05$ ), sehingga mengkonfirmasi H2 dan menyiratkan jika leverage berdampak signifikan pada penghindaran pajak.

Kepemilikan institusional mempunyai nilai signifikansi kurang dari  $\alpha$  ( $0,001 < 0,05$ ), mengkonfirmasi H3 dan mengindikasikan jika kepemilikan institusional secara signifikan memengaruhi penghindaran pajak.

## 4.6. Pembahasan

### 4.6.1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada tabel 4.10 menunjukkan hasil berpengaruh positif signifikan. Hal ini menunjukkan



semakin besar ukuran perusahaan maka semakin tinggi tingkat arn pajak. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perusahaan besar

cenderung memiliki jumlah aset yang besar dan keuntungan yang besar. Margin keuntungan yang tinggi berarti bahwa beban pajak yang juga tinggi. Hal ini memberikan dorongan bagi perusahaan untuk mengendalikan perpajakan secara lebih efektif, salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak

Hasil ini sesuai dengan teori akuntansi yang menyatakan bahwa perusahaan yang besar yang bonafid yang lebih cenderung menggunakan metode akuntansi yang akan membuat pendapatan atau laba usaha operasional perusahaan seolah-olah tampak menurun (kecil), yang bertujuan untuk mengurangi pajak usaha di mana hal ini termasuk upaya penghindaran pajak (Hery, 2017).

Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian (Fauzan et al, 2019) dan (J. V. Putri & Suhardjo, 2022) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fitriani & Sulistyawati, 2020) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghidaran pajak.

#### **4.6.2. Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak**

Pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada tabel 4.10 menunjukkan hasil berpengaruh positif signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi *leverage* maka akan semakin tinggi penghindaran pajak perusahaan. Perusahaan yang memiliki *leverage* yang tinggi dapat menurunkan beban pajaknya dengan memanfaatkan insentif pajak untuk beban bunga. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin meningkatnya *leverage*



perusahaan menunjukkan adanya kecenderungan melakukan aran pajak.

Hal tersebut sesuai dengan teori akuntansi positif yang menyatakan jika manajemen perusahaan akan menerapkan kebijakan akuntansi yang paling menguntungkan bagi mereka. Salah satu kebijakan yang dapat dimanfaatkan yaitu penggunaan jumlah utang dalam pendanaan aktivitas operasi, dimana semakin tinggi jumlah utang yang dimiliki maka akan timbul beban bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Beban bunga tersebut dapat menjadi pengurang dalam pembayaran pajak, selain itu laba kena pajak perusahaan yang bersumber dari utang cenderung lebih kecil sehingga banyak perusahaan yang memilih menggunakan utang sebagai sumber pendanaan daripada penerbitan saham (Mahdiana & Amin, 2020).

Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian (Fauzan et al, 2019) dan (Fitriani & Sulistyawati, 2020) yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Anggraini & Destriana, 2022) yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

#### **4.6.3. Pengaruh Kepemilikan Institusioanl terhadap Penghindaran Pajak**

Pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak yang pada tabel 4.10 menunjukkan hasil berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Hal tersebut dikarenakan pemilik saham institusional mencari keuntungan setinggi mungkin atas aset mereka. Hal ini memberikan dorongan kepada manajemen perusahaan



oil langkah-langkah untuk mengurangi beban pajak salah satunya praktik penghindaran pajak.

Hal ini sesuai dengan teori agensi yang menyatakan bahwa manajemen perusahaan (*agent*) berupaya untuk memaksimalkan keuntungan guna memenuhi harapan pemegang saham (*principal*). Hal ini memberikan dorongan kepada manajemen perusahaan untuk berupaya membayar pajak seminimal mungkin, karena pajak dianggap dapat menjadi pengurang terhadap laba bersih.

Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian (Darsani & Sukartha, 2021) dan (Dewi, 2019) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Moeljono, 2020) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, leverage, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur industri barang konsumsi periode 2019-2022 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan uji regresi berganda dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
2. Variabel *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
3. Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

#### 5.2. Keterbatasan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan. Keterbatasan-keterbatasan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran dan peluang bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang lebih baik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut.



danya perusahaan manufaktur industri barang konsumsi yang tidak menerbitkan laporan keuangannya di Bursa Efek Indonesia.

2. Adanya data penelitian yang outlier sehingga membuat jumlah sampel hanya 93 dari 104 populasi yang ada.

### 5.3. Saran

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya pada bidang perpajakan. Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka dapat diberikan beberapa saran kepada penelitian selanjutnya sebagai berikut.

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti perusahaan dari sektor industri lain selain industri barang konsumsi. Dengan demikian dapat diketahui pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak dari masing-masing sektor industri yang ada.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan atau meneliti variabel bebas lainnya yang mungkin mempengaruhi tindakan penghindaran pajak seperti pertumbuhan penjualan, insentif pajak, likuiditas, dan *financial distress*.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan periode penelitian menjadi lebih dari empat tahun, sehingga dapat memberikan tingkat generalisasi yang lebih tinggi.
4. Peneliti selanjutnya disarankan dapat menggunakan pengukuran selain CETR (*Cash Effective Tax Rate*) dalam mengukur penghindaran pajak. Salah satunya dengan menggunakan pengukuran *Book-Tax Gap*, sehingga tidak hanya dari satu sudut pandang.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, R., & Febrianti, M. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia*. 21(1), 185–192.
- Anggraini, N. F., & Destriana, N. (2022). *Penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur*. 2(2), 959–970.
- Ardyansah, D., & Zulaikha. (2014). *Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio dan Komisaris Independen terhadap Effective Tax Rate (ETR)*. 3, 1–9.
- Ayu, G., Lestari, W., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2017). *Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik, dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak*. 18, 2028–2054.
- Darmawan, I. G. H., & Sukartha, I. M. (2014). *Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return on Assets, dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak*. 1, 143–161.
- Darsani, P. A., & Sukartha, I. M. (2021). *The Effect of Institutional Ownership , Profitability , Leverage and Capital Intensity Ratio on Tax Avoidance*. 5(1), 13–22.
- Dewanti, I. G. A. D. C., & Sujana, I. K. (2019). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Corporate Social Responsility, Profitabilitas dan Leverage pada Tax Avoidance*. 28(1), 377–406.
- Dewi, N. M. (2019). *Pengaruh Kepemilikan Institusional , Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak ( Tax Avoidance ) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016*. 9(1), 40–51.
- Dharma, I. M. S., & Ardiana, P. A. (2016). *Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance*. 15, 584–613.
- Fitriani, A., & Sulistyawati, A. I. (2020). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. 18(2).
- Gazali, A., Karamoy, H., & Gamaliel, H. (2020). *Pengaruh Leverage , Kepemilikan Institusional dan Arus Kas Operasi Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Tambang yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2019*. 11(2), 84–96.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hapsari, D. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Tax Avoidance a Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada un 2016 -2018*. 14(2), 59–65.
- n, Ali. (2020). *Pengaruh Profitabilitas (ROA), Leverage (LTDER) dan nsitas Aktiva Tetap terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada*



*Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2017. 7(1), 85-92*

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. 3, 305–360.*

Jumailah, V. (2020). *Pengaruh Thin Capitalization dan Konservatisme Akuntansi terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi. 3(1), 13–21.*

Kalbuana, N., & Yanti, D. R. (2020). *The Influence of Capital Intensity, Firm Size, and Leverage on Tax Avoidance on Companies Registered in Jakarta Islamic Index (JII) Period 2015-2019. 2020(3), 272–278.*

Kurniasih, T., & Sari, M. M. R. (2013). *Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. 18(1), 58–66.*

Langi Gabriella, J. T., Kalangi, L., & Warongan, J. D. L. (2023). *Pengaruh Capital Intensity, Leverage, Sales Growth, dan Market-To-Book-Ratio terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Kesehatan di Indonesia. 14(1), 97–112.*

Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance. 0832(1), 127–138.*

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi.* Andi.

Moeljono. (2020). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. 5(1), 103–121.* <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645>

Nursari, M., Diamonalisa, & Sukarmanto, E. (2016). *Pengaruh Profitabilitas , Leverage , dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance ( Studi Empiris pada Perusahaan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia ( BEI ) pada Periode Tahun 2009-2016 ). 259–266.*

Olivia, D., & Amah, N. (2019). *Pengaruh Leverage dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility sebagai Variabel Pemoderasi pada Perusahaan Subsektor Pertambangan Batubara yang Listing di BEI Tahun 2013-2017. 442–453.*

P.J.A., A. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak.* PT. Eresco.

Pohan, C. . (2013). *Manajemen Perpajakan.* PT. Gramedia Pustaka Utama.

Puspita, D., & Febrianti, M. (2017). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 19(1), 38–46.*

Putri, J. V., & Suhardjo, F. (2022). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Non-Keuangan di Bursa Efek Indonesia. 2(1), 103–118.*



R., & Putra, B. I. (2017). *Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan dan Proporsi Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. 1–11.*

- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (Edisi 11 B). Salemba Empat.
- Salwah, S., & Herianti, E. (2019). *Pengaruh Aktivitas Thin Capitalization terhadap Penghindaran Pajak*. 3(1), 30–36.
- Sonia, S., & Suparmun, H. (2019). *Factors Influencing Tax Avoidance*. 73, 238–243.
- Suandy, E. (2017). *Perencanaan Pajak Edisi 6* (6th ed.). Salemba Empat.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta.
- Sunarsih, Yahya, F., & Haryono, S. (2019). *Pengaruh Profitabilitas , Leverage , Corporate Governance , dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index*. 13(1), 127–148.
- Swingly, C., & Sukartha, I. M. (2015). *Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Sales Growth pada Tax Avoidance*. 1, 47–62.
- Vivi, O., Ulfi, J., & Jaka Wijaya, K. (2021). *Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance ( Pada Perusahaan properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance | Hal 143-151*. 01(02), 143–151.
- Waluyo, T. M., Basri, Y. M., & Rusli. (2015). *Pengaruh Return on Asset , Leverage , Ukuran Perusahaan , Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak*. 1–25.
- Wanda, P. A., & Halimatusadinah, E. (2021). *Pengaruh Solvabilitas dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak*
- Wardhana, & Hendra, A. (2019). *Analisis Dampak Pembangunan Perumahan terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kota Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan*. 2(4), 1039–1051.
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (2010). *Accounting Theory* (7th ed.). John Wiley & Sons.
- Wen, W., & Muhammad, M. M. (2022). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia*. 8(4), 4629–4647.
- Wijayanti, Y. C., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). *Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak*. 20, 699–728.
- Xaviera, A., Muslih, M., & Kurnia. (2020). *Jurnal Mitra Manajemen ( JMM Online )*. 4(5), 692–707.
- Yohan, & Pradipta, A. (2019). *Pengaruh ROA, Leverage, Komite Audit, Size, Sales Growth terhadap Tax Avoidance*. 21(1), 1–8.



# LAMPIRAN



**Lampiran 1. Biodata Penulis****BIODATA****Identitas Diri**

Nama : Rezki Rahmadani Octarina S  
Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 31 Oktober 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat Rumah : Jl. Sepakat Kera-Kera  
Telpon Rumah dan HP : 085256692950  
Alamat Email : rezkiocarina3001@gmail.com

**Riwayat Pendidikan****A. Pendidikan Formal**

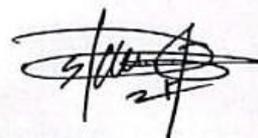
1. 2008-2014: SD Negeri Bung Makassar
2. 2014-2017: SMP Negeri 23 Makassar
3. 2017-2020: SMA Negeri 21 Makassar
4. 2020-2024: S1 Akuntansi Universitas Hasanuddin

**Pengalaman****A. Organisasi**

1. Anggota Divisi Logistik UKM Radio Kampus EBS FM Unhas, Periode 2021-2022
2. Anggota Divisi Broadcasting Manager UKM Radio Kampus EBS FM Unhas, Periode 2022-2023

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya

Makassar, 6 Mei 2024



Rezki Rahmadani Octarina S

